

**KERJASAMA PEMBANGUNAN EKONOMI ARAB SAUDI – TIONGKOK
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SAUDI VISION 2030**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen

Ilmu Hubungan Internasional

Disusun oleh :

AULIA NURFADILLA

E061181011

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

**KERJASAMA PEMBANGUNAN EKONOMI ARAB SAUDI – TIONGKOK
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SAUDI VISION 2030**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Disusun oleh :

AULIA NURFADILLA

E061181011

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KERJASAMA PEMBANGUNAN EKONOMI ARAB SAUDI-TIONGKOK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SAUDI VISION 2030

N A M A : AULIA NURFADILLA

N I M : E061181011

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 30 Januari 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,

Dr. H. Adi Suryadi B, MA.
NIP. 196302171992021001

Pembimbing II,

Des. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si
NIP. 196304241991031002



Mengesahkan :

Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,

Aswin Baharuddin, S.IP, MA.
NIP. 198607032014041002

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KERJASAMA PEMBANGUNAN EKONOMI ARAB SAUDI-TIONGKOK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SAUDI VISION 2030

N A M A : AULIA NURFADILLA

N I M : E061181011

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 25 Januari 2024.

TIM EVALUASI

Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B, MA

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Nurfadilla

NIM : E061181011

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S-1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul:

**“Kerjasama Pembangunan Ekonomi Arab Saudi-Tiongkok Dalam Rangka
Mewujudkan Saudi Vision 2030”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain, dan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,


BE6F2ALX081882673

Aulia Nurfadilla

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kerjasama Pembangunan Ekonomi Arab Saudi-Tiongkok Dalam Rangka Mewujudkan Saudi Vison 2030”. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah menunjukkan jalan kebenaran. Dalam proses menyelesaikan skripsi, penulis tentunya menyadari banyaknya kekurangan serta keterbatasan yang terjadi sehingga memperoleh bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta, **Alm. Bapak Muhammad Ali** dan **Ibu Harnida** yang memberi inspirasi dan contoh baik yang akan selalu saya ingat. Ibu yang tak henti-hentinya untuk memberikan kasih sayang serta motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini kepada peneliti. Terima kasih atas seluruh doa, harapan, motivasi, arahan dan kerja keras yang diberikan demi masa depan penulis.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin
3. Bapak **Phil Sukri, S. IP, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Wakil Dekan, serta seluruh staff.
4. Bapak **H. Darwis, MA, Ph.D** sebagai Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, dan Bapak **Aswin Baharuddin, S.IP, M.A** sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional.
5. Bapak **Dr. H. Adi Suryadi B, MA** selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing Akademik dan Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, waktu dan masukan yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu **Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional** yang telah memberikan ilmu dan pengajaran selama perkuliahan.
7. Sahabat seperjuangan **Nurfadillah** dan **Megawati Tahar** yang telah kebersamai peneliti dalam suka-duka penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak karena telah memberi motivasi dan menjadi teman curhat sekaligus teman jalan saat penulis sedang mengalami kesulitan dalam masa-masa penyusunan skripsi.
8. Teman-teman HI 2018 **Aminah, Rhin, Nahda, Ryan, Fikri, Asria, Randika, Sepbrina, Alfitrah, Luthfania, Hanuun, Ihza, dan Syahrin** dan teman-teman **REFORMA HI 2018** lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dalam memberikan informasi, saran, dan motivasi kepada peneliti saat penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang secara langsung/tidak langsung membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir, penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan sangat butuh perbaikan untuk kedepannya. Oleh itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan. Penulis benar-benar bersyukur dan akan menerima segala masukan dan saran dari para pembaca.

Makassar, 21 Desember 2023

Penulis

ABSTRAK

Aulia Nurfadilla (E061181011) “Kerjasama Pembangunan Ekonomi Arab Saudi-Tiongkok Dalam Rangka Mewujudkan Saudi Vision 2030” dibawah bimbingan Dr. H. Adi Suryadi, B. MA selaku Pembimbing I dan Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M. Si selaku Pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Pada tahun 2016, Arab Saudi telah mengumumkan sebuah strategi reformasi ekonomi yang dinamakan sebagai Saudi Vision 2030 dengan tujuan untuk diversifikasi ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Arab Saudi membangun berbagai proyek infrastruktur dan memberi peluang besar kepada para investor asing untuk berinvestasi. Arab Saudi kemudian melakukan kerjasama dengan negara lain dalam upaya pembangunan ekonomi, salah satunya adalah Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi dan Tiongkok telah mengalami peningkatan kerjasama bilateral dan berupaya untuk menyelaraskan antara strategi *Saudi Vision 2030* dan strategi *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok yang juga berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Arab Saudi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030 melalui kerjasama dengan Tiongkok, serta peluang dan tantangan dalam kerjasama pembangunan ekonomi dengan Tiongkok. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan judul penulis melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Arab Saudi bekerjasama dengan Tiongkok dengan melihat aspek-aspek kapabilitas dan posisinya terhadap kebijakan BRI untuk mewujudkan kepentingannya terkait Saudi Vision 2030. Kerjasama yang terjalin antara Arab Saudi dan Tiongkok membuka peluang terwujudnya aspek-aspek dalam Saudi Vision 2030 yang terkait dengan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor dengan memanfaatkan investasi asing Tiongkok dan juga adanya tantangan kerjasama baik internal maupun eksternal yang dapat menghambat peningkatan hubungan kerjasama kedua negara.

Kata Kunci : Arab Saudi, China, *Saudi Vision 2030*, *Belt and Road Initiative*, Kebijakan Luar Negeri, Kerjasama Bilateral, Investasi Asing.

ABSTRACT

Aulia Nurfadilla (E061181011) "Saudi Arabia-China Economic Development Cooperation in the Context of Realizing Saudi Vision 2030" under the guidance of Dr. H. Adi Suryadi, B. MA as Supervisor I and Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M. Si as Supervisor II at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

In 2016, Saudi Arabia announced an economic reform strategy called Saudi Vision 2030 with the aim of diversifying the economy. To make this happen, Saudi Arabia is building various infrastructure projects and providing great opportunities for foreign investors to invest. Saudi Arabia then collaborated with other countries in economic development efforts, one of which was China. In recent years, Saudi Arabia and China have experienced increased bilateral cooperation and sought to align the Saudi Vision 2030 strategy with China's Belt and Road Initiative (BRI) strategy which also focuses on increasing connectivity through infrastructure development.

This research aims to determine Saudi Arabia's strategy in realizing Saudi Vision 2030 through cooperation with China, as well as the opportunities and challenges in economic development cooperation with China. In this research the author used a qualitative research method by collecting data obtained from literature related to the author's title through literature study. The results of this research show that Saudi Arabia is collaborating with China by looking at aspects of its capabilities and position regarding BRI policies to realize its interests related to Saudi Vision 2030. The cooperation that exists between Saudi Arabia and China opens up opportunities for the realization of aspects of Saudi Vision 2030 related to infrastructure development in various sectors by utilizing Chinese foreign investment and also the challenges of cooperation both internal and external which could hinder the improvement of cooperative relations between the two countries.

Keywords: Saudi Arabia, China, Saudi Vision 2030, Belt and Road Initiative, Foreign Policy, Bilateral Cooperation, Foreign Investment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SKEMA & GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL & GRAFIK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Kebijakan Luar Negeri Perspektif Strategi.....	23
B. Kerjasama Bilateral.....	28
C. Investasi Asing.....	32
D. Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM.....	41
A. Hubungan Bilateral Arab Saudi-Tiongkok.....	41
B. Saudi Vision 2030.....	50
C. Belt and Road Initiative.....	64
BAB IV KERJASAMA PEMBANGUNAN EKONOMI ARAB SAUDI-TIONGKOK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SAUDI VISION 2030..	72
A. Strategi Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi Terhadap BRI Tiongkok Dalam Rangka Mewujudkan Saudi Vision 2030.....	72
B. Peluang dan Tantangan Dalam Kerjasama Pembangunan Ekonomi Arab Saudi dan Tiongkok.....	95
1. Peluang Dalam Kerjasama Pembangunan Ekonomi Arab Saudi dan Tiongkok.....	98
2. Tantangan Dalam Kerjasama Pembangunan Ekonomi Arab Saudi dan Tiongkok.....	123
BAB V PENUTUP.....	137

A. Kesimpulan	137
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN.....	164

DAFTAR SKEMA & GAMBAR

Skema 1. Kerangka Konsep.....	10
Gambar 1. Peta Jalur Belt and Road Initiative (BRI).....	66
Gambar 2. Lokasi Strategis Arab Saudi di Sekitar Jalur Perdagangan Global.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perdagangan Bilateral Arab Saudi-Tiongkok 2017-2021.....	43
Tabel 2. Perbandingan Ekspor dan Impor Arab Saudi dan Tiongkok.....	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. GDP Arab Saudi dan Tiongkok.....	79
Grafik 2. FDI Arab Saudi dan Tiongkok.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arab Saudi merupakan negara yang memiliki ladang minyak melimpah dengan pendapatan negara mayoritas berasal dari aktivitas ekonomi melalui ekspor minyak. Sebanyak 16% cadangan minyak berada di Arab Saudi dan menjadi negara pengekspor minyak terbesar. Bidang ini menyumbang 87% dari pendapatan anggaran, 90% dari kegiatan ekspor, dan 42% berasal dari Produk Domestik Bruto (PDB) (CIA, 2018). Hal ini membawa Arab Saudi menuju modernitas dengan adanya perkembangan di berbagai bidang dan pembangunan berbagai proyek infrastruktur dengan modal yang besar.

Namun dalam perkembangannya, terdapat berbagai ancaman dan tantangan yang membayangi Arab Saudi sebagai negara dengan perekonomian yang mayoritas bergantung pada minyak dan tidak melakukan diversifikasi. Permintaan akan minyak yang terus meningkat menjadi tantangan tersendiri bagi Arab Saudi untuk menghindari ancaman pasokan minyak yang menipis (Niblock & Malik, 2007, p. 1). Penggunaan bahan bakar dalam skala besar utamanya minyak pun juga dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan perubahan iklim.

Tidak hanya itu, harga minyak yang berubah juga akan berdampak pada aktivitas ekonomi secara global dan juga berdampak besar bagi negara produsen minyak termasuk Arab Saudi. Pada rentang tahun 2014-2016, telah terjadi penurunan harga minyak terbesar yang berdampak pada perekonomian global.

Negara-negara produsen minyak utama seperti Arab Saudi tentunya mengalami kerugian akibat dari turunnya harga minyak mentah. Penurunan harga minyak pada tahun 2014 menyebabkan defisit anggaran Arab Saudi sebanyak 13,5% dari PDB setelah 18 bulan (The Economist, 2016). Selain masalah terkait minyak, Arab Saudi juga dihadapkan pada masalah kesejahteraan dan masa depan penduduknya. Peningkatan populasi penduduk yang tinggi dengan mayoritas adalah kelompok produktif dengan jumlah pengangguran mencapai 15,4% menuntut Arab Saudi untuk meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan di bidang non-migas (Cole, 2021).

Oleh sebab itu, untuk menghadapi tantangan diatas, Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan maupun strategi dengan tujuan untuk mereformasi ekonomi. Hal itu dilakukan dengan melalui berbagai upaya pembangunan infrastruktur untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di bidang non-migas seperti pengembangan pariwisata dan energi terbarukan, serta industri yang juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi investor dan negara mitra dalam kerjasama pembangunan proyek infrastruktur. Salah satu bentuk kebijakan Arab Saudi dalam upaya mereformasi ekonominya yaitu program Saudi Vision 2030.

Saudi Vision 2030 adalah strategi kebijakan Arab Saudi dengan tujuan untuk mendiversifikasi ekonominya agar tidak bergantung pada minyak. Visi ini diumumkan pada 25 April 2016 oleh Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammad Bin Salman (MBS). Rancangan ini dibuat oleh Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan yang didalamnya telah mencakup berbagai strategi reformasi ekonomi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur dan reformasi di

beberapa bidang. Saudi Vision 2030 ini terdiri dari tiga tema utama yaitu masyarakat yang dinamis (*A Vibrant Society*), ekonomi yang berkembang (*Thriving Economy*), dan bangsa yang ambisius (*An Ambition Nation*) (The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia in Washington, n.d.).

Latar belakang dibentuknya Saudi Vision 2030 ini tidak terlepas dari keinginan Arab Saudi untuk meningkatkan perannya sebagai jantung dunia Arab dan Islam, keinginan untuk menjadi kekuatan investasi global dan pusat perdagangan di sekitar jalur perairan utama dunia dan semangat untuk mentransformasi dan memanfaatkan potensi geografis Arab Saudi yang strategis menjadi penghubung antara tiga benua yaitu Asia, Eropa, dan Afrika (Saudi Vision 2030). Untuk mewujudkan kepentingan tersebut maka Arab Saudi melakukan berbagai upaya salah satunya yaitu melalui pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur yang dibangun bukan hanya terkait pembangunan jalan dan pelabuhan untuk konektivitas saja melainkan mencakup banyak bidang seperti infrastruktur pariwisata, teknologi, energi, hingga kawasan industri.

Secara umum, Saudi Vision 2030 merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk melakukan reformasi dan menciptakan perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan di Arab Saudi. Hal ini mencerminkan komitmen Arab Saudi untuk menghadapi tantangan ekonomi dan sosial serta untuk bersiap menghadapi masa depan yang lebih berkiblat pada teknologi. Bagi Arab Saudi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting untuk pertumbuhan perekonomian suatu negara sehingga ketersediaan infrastruktur di berbagai sektor

menjadi kunci dalam upaya percepatan pembangunan sosial dan ekonomi serta menunjukkan kemajuan suatu negara. Melalui Saudi Vision 2030, komitmen Arab Saudi untuk menciptakan lingkungan bisnis dan peningkatan ekonomi juga secara langsung membuka kesempatan besar bagi negara lain untuk ikut serta dalam visi yang ambisius ini melalui investasi dan pembangunan proyek infrastruktur yang dibangun atas dasar kerja sama. Oleh sebab itu, hal ini menjadi momentum bagi Arab Saudi untuk mendapatkan negara mitra baru yang dapat bekerjasama dalam membangun proyek infrastruktur yang direncanakan dan membantu pertumbuhan ekonominya melalui investasi.

Salah satu negara yang ikut berpartisipasi dan memiliki komitmen bersama dengan Arab Saudi adalah Tiongkok. Tidak hanya Amerika Serikat, saat ini Tiongkok telah menjadi negara yang berperan sebagai mitra strategis bagi Arab Saudi. Arab Saudi dan Tiongkok telah menjalin kerjasama sejak tahun 1990 dan lebih berfokus pada kerjasama di bidang ekonomi. Sejak tahun 2013, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Arab Saudi dan sebaliknya juga pada rentang tahun 2000-2015, Arab Saudi menjadi pemasok minyak mentah terbesar untuk Tiongkok. Kedua negara saling mendukung untuk membentuk hubungan *win-win cooperation* dan juga dimana keduanya memiliki prinsip non-intervensi terkait urusan internalnya (Saudi Gazette, 2018).

Sejak tahun 2013, Presiden Xi Jinping mengumumkan program yang dinamakan Inisiatif Sabuk dan Jalan atau *Belt and Road Initiative* (BRI) yang bertujuan untuk pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi demi kepentingan perdagangan dan kemudahan konektivitas yang akan

menghubungkan Tiongkok dengan Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, kemudian Eropa. Melalui program ini, manfaat yang diharapkan oleh pemerintah Tiongkok bukan hanya soal pengembangan pasar tetapi juga peningkatan prospek bisnis dengan melibatkan perusahaan investasi dan konstruksi. Oleh negara-negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi, hal ini kemudian dilihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur (Burton, 2021).

Tiongkok telah menjadi negara yang berperan sebagai mitra strategis bagi Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Pada tahun 2014, dalam proses kerjasama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, Tiongkok mengusulkan strategi implementasi 1+2+3 dimana “1” adalah kerjasama energi sebagai fokus utama, “2” yang mengacu pada pembangunan infrastruktur dan fasilitasi perdagangan serta investasi, dan “3” merupakan kerjasama di bidang industri dan teknologi seperti energi nuklir dan energi terbarukan (Sike, 2018). Disisi lain, negara-negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi memiliki kebijakan luar negeri “*Look East Policy*” dan optimis dengan perkembangan Tiongkok serta peran positifnya dalam lingkup global. Sehingga konsep pembangunan “*Belt and Road Initiative*” dipandang sebagai upaya pembangunan bersama yang menjadi kesempatan untuk menciptakan situasi perdamaian di wilayah Timur Tengah (Jun, 2016, p. 29).

Pada Januari tahun 2016, Presiden Xi Jinping berkunjung ke Arab Saudi dan kemudian kedua negara memutuskan untuk membentuk Komite Bersama Tingkat Tinggi (*High Level Joint Committee*) untuk mendukung peningkatan hubungan bilateral (Al-Tamimi, 2017). Di tahun yang sama juga hubungan kedua

negara kemudian semakin meningkat dengan penandatanganan perjanjian kemitraan strategis yang komprehensif oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud di Riyadh (Hussain, 2022). Kemitraan strategis yang komprehensif merupakan tingkat tertinggi dari lima kategori dari hubungan diplomatik Tiongkok dan menjadi salah satu kebijakan kemitraannya. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa Tiongkok memiliki tingkat kepentingan terhadap suatu negara dan Arab Saudi menjadi salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki tingkat kemitraan ini dengan Tiongkok yang menunjukkan adanya posisi penting Arab Saudi bagi Tiongkok. Tingkat kemitraan ini mendorong kedua negara untuk terus mempertahankan komitmen, meningkatkan saling pengertian dalam isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, serta memperluas sektor-sektor kerjasama (Fulton, 2019).

Tidak hanya itu, di tahun 2017, Raja Salman mengunjungi Tiongkok dan mempromosikan penyelarasan strategi pembangunan antara kedua negara dan memperdalam kerjasama di bawah kerangka program BRI. Dalam kunjungan Raja Salman ini terjadi penandatanganan beberapa dokumen kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, energi terbarukan, pendidikan, budaya, serta ekonomi (Sun & Zoubir, 2014). Dalam pertemuan kedua Komite Tingkat Tinggi di Jeddah pada bulan Agustus 2017, kedua pihak juga telah mencapai hasil dari proyek-proyek utama yang berjalan lancar yang terdiri dari 30 proyek (Saudi Gazette, 2018). Saat ini terdapat lebih dari 160 perusahaan Tiongkok yang beroperasi di beberapa sektor ekonomi Arab Saudi dan juga terdapat banyak

proyek Tiongkok di Arab Saudi utamanya terkait infrastruktur di berbagai bidang (Al-Tamimi, 2017).

Saudi Vision 2030 yang diusung oleh Arab Saudi dikatakan memiliki kesamaan dengan program BRI Tiongkok utamanya dalam upaya pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Sejak Arab Saudi mengumumkan terkait Saudi Vision 2030 untuk mendorong pembangunan di negaranya, Tiongkok langsung mengapresiasi visi tersebut dan menyatakan bersedia untuk membantu Arab Saudi dalam mewujudkannya. Disamping itu, Tiongkok juga mengapresiasi terkait partisipasi Arab Saudi dalam program BRI di wilayah Timur Tengah.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan berfokus pada analisis strategi Arab Saudi untuk mewujudkan Saudi Vision 2030 dalam hal pembangunan infrastruktur melalui kerjasama dengan BRI Tiongkok. Penting untuk diteliti bahwa Saudi Vision 2030 kemudian menjadi faktor utama yang mendorong kebijakan luar negeri Arab Saudi untuk menjalin kerjasama dengan Tiongkok dalam kerangka kerjasama program BRI. Di sisi lain, strategi Tiongkok untuk menyukseskan BRI tidak terlepas dari pentingnya dukungan kuat Arab Saudi dengan membangun proyek yang juga erat kaitannya dengan BRI. Dalam hal ini, terdapat kontribusi Tiongkok dalam membantu Arab Saudi untuk mewujudkan pembangunan dan disisi lain Tiongkok tidak dapat melaksanakan BRI dengan lancar tanpa dukungan Arab Saudi sebagai kekuatan regional. Tidak hanya itu, penelitian ini juga akan berfokus pada peluang dan tantangan yang ada dalam kerangka kerjasama pembangunan ekonomi Arab Saudi dan Tiongkok.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada pembahasan terkait analisis strategi Arab Saudi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030 melalui kerangka kerja sama dengan Tiongkok. Dalam hal ini terkait dengan sinergi antara Saudi Vision 2030 dan BRI beserta peluang yang tercipta serta tantangan yang dihadapi dalam kerjasama tersebut. Kerja sama ekonomi yang terjalin antara dua negara akan berfokus pada kerja sama pembangunan ekonomi khususnya investasi dan konstruksi infrastruktur di Arab Saudi pada rentang waktu tahun 2016-2022. Saudi Vision 2030 dan Belt and Road Initiative (BRI) menjadi dasar penelitian karena keduanya merupakan inisiatif pembangunan ekonomi yang signifikan. Saudi Vision 2030 bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak dan meningkatkan daya saing. Sementara itu, Belt and Road Initiative Tiongkok adalah proyek infrastruktur global yang dapat memberikan peluang bagi Arab Saudi untuk mewujudkan Saudi Vision 2030 melalui investasi. Kedua inisiatif ini saling terkait dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi, menjadikannya fokus penelitian yang relevan. Tahun 2016 menjadi fokus penelitian dikarenakan Saudi Vision 2030 pertama kali diumumkan pada tahun 2016, lalu kemudian penelitian difokuskan hingga tahun 2022 untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kerjasama utamanya dalam hal pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Arab Saudi.

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri perspektif strategi, kerjasama bilateral, dan investasi asing. Dengan

demikian berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Arab Saudi dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui kerjasama dengan Tiongkok?
2. Bagaimana peluang dan tantangan kerjasama pembangunan ekonomi Arab Saudi dan Tiongkok dalam rangka mewujudkan Saudi Vision 2030 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

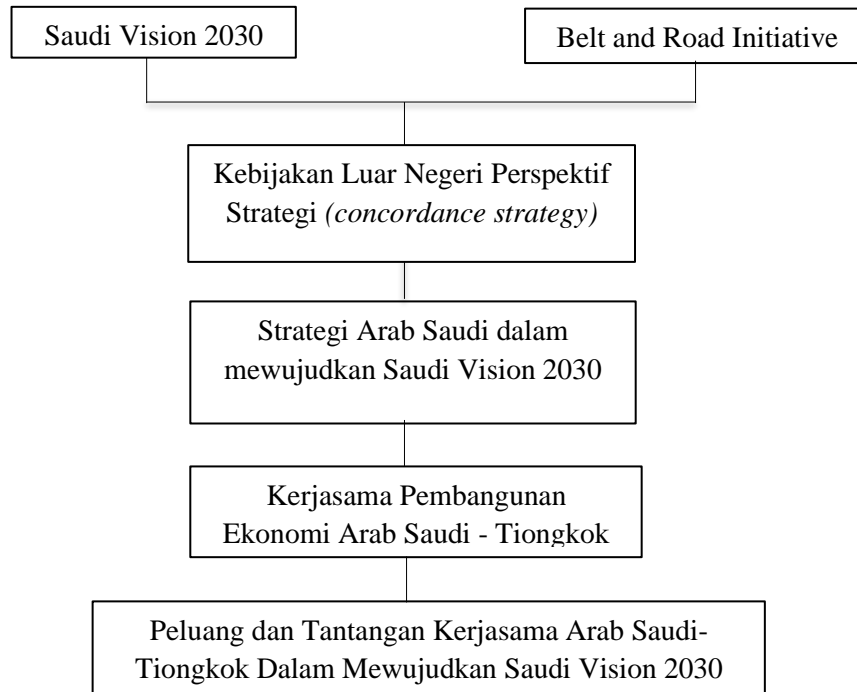
1. Untuk mengetahui strategi Arab Saudi dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui kerangka kerjasama dengan Tiongkok.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam kerangka kerjasama antara Arab Saudi dan Tiongkok dalam mewujudkan Saudi Vision 2030.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan bidang ilmu Hubungan Internasional kedepannya khususnya terkait bidang kajian kebijakan luar negeri dan kerjasama internasional.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang memberikan wawasan dan informasi terkait kerjasama antara Arab Saudi-Tiongkok dalam rangka pembangunan infrastruktur di Arab Saudi.

E. Kerangka Konseptual



Skema 1. Kerangka Konsep

Penelitian ini menggunakan tiga konsep yang akan menjelaskan hubungan antara dua variabel yang akan diteliti oleh penulis. Konsep tersebut adalah kebijakan luar negeri perspektif strategi, kerjasama bilateral, dan investasi asing. Konsep kebijakan luar negeri perspektif strategi digunakan untuk menganalisis pola strategi Arab Saudi dalam kerjasama pembangunan ekonomi dengan Tiongkok untuk mewujudkan Saudi Vision 2030. Pola strategi yang dihasilkan merupakan hasil dari pertimbangan terhadap aspek-aspek yang memengaruhi diantaranya yaitu perbandingan kapabilitas dan posisi Arab Saudi terhadap strategi BRI Tiongkok. Dari pola *concordance strategy* inilah yang kemudian mendorong adanya kerjasama bilateral yang terjalin antara kedua negara. Adapun konsep kerjasama bilateral dan konsep investasi asing digunakan untuk

menganalisis kerjasama pembangunan ekonomi antara Arab Saudi dan Tiongkok baik dari segi peluang dan tantangan dalam pengaruhnya untuk mewujudkan Saudi Vision 2030.

a. Kebijakan Luar Negeri Perspektif Strategi

Antara politik luar negeri dan kebijakan luar negeri tentunya saling terkait satu sama lain. Politik luar negeri merupakan identitas sebuah negara ketika menjalin hubungan dengan negara lain dan kebijakan luar negeri menjadi bentuk implementasi atau akumulasi dari politik luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh suatu negara dalam rangka hubungan dengan negara lain dan terdiri atas serangkaian proses yang meliputi proses perencanaan, strategi untuk mencapai tujuan, dan implementasi (Ashari, 2015, p. 194).

Dalam politik internasional, setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, setiap negara memiliki strategi masing-masing dalam implementasi kebijakan luar negerinya untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam penelitian ini, konsep kebijakan luar negeri yang akan digunakan adalah konsep yang dikemukakan oleh John Lovell yaitu kebijakan luar negeri perspektif strategi.

Menurut Lovell, konsep kebijakan luar negeri dari perspektif strategi merupakan sebuah rencana untuk mencapai kepentingan nasional dengan memperhatikan aspek internal dan eksternal, persepsi elit, strategi negara dan negara lain serta kapabilitas suatu negara. Dalam hal ini, upaya pencapaian kepentingan nasional dapat dilakukan melalui interaksi antara pihak yang

bekerjasama. Fokus dari perspektif ini terdapat pada penekanan dalam interaksi yang terjalin antar negara-negara yang terlibat daripada mengkaji peristiwa hanya dari sudut pandang salah satu negara yang memberi tanggapan saja. Strategi kebijakan luar negeri mencerminkan perkiraan kemampuan negara sendiri dibandingkan kemampuan negara lain. Analisis kebijakan luar negeri dari perspektif ini berusaha untuk mengidentifikasi perkiraan yang dibuat oleh pembuat kebijakan suatu negara terhadap strategi negara lain (P.Lovell, 1970, p. 73). Strategi negara lain, persepsi elit, dan kapabilitas yang dimiliki oleh suatu negara akan menjadi faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses perumusan strategi kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor-faktor ini yang kemudian menghasilkan bagaimana motif interaksi antar negara dalam perspektif ini yang meliputi *leadership strategy*, *concordance strategy*, *confrontation strategy*, dan *accommodative strategy*.

Leadership Strategy adalah strategi saat kapabilitas negara sendiri dianggap lebih unggul daripada negara lain dan strategi negara lain dianggap dapat mendukung kepentingan nasional negara. Sehingga bentuk strategi yang digunakan adalah dengan melalui tawar-menawar atau bujukan. *Concordance Strategy* adalah strategi saat kapabilitas negara sendiri dianggap lemah dibanding negara lain. Sehingga negara berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara lain yang memiliki kapabilitas lebih unggul. Hal ini terjadi dalam situasi dimana kedua negara memiliki kesamaan kepentingan. Adapun kedua pola interaksi ini merupakan pola yang melihat strategi negara lain sebagai strategi yang mendukung kepentingan nasional (P.Lovell, 1970, p. 100).

Adapun sebaliknya, *confrontation strategy* merupakan strategi disaat kapabilitas negara sendiri unggul dibanding negara lain sehingga dengan bebas melakukan tindakan yang dapat memicu konflik dengan mempertajam kepentingan yang bertentangan yang kemudian memaksa negara lain untuk pengakuan akan keunggulan kapabilitasnya. *Accomodation strategy* merupakan strategi disaat kapabilitas negara sendiri lebih rendah dibanding negara lain sehingga tindakan yang diambil adalah cenderung untuk menghindari konflik yaitu dengan menyesuaikan diri dengan negara yang kapabilitasnya lebih tinggi. Kedua pola ini melihat strategi yang dikeluarkan oleh negara lain sebagai strategi yang mengancam kepentingan nasional (P.Lovell, 1970, p. 100).

Dalam penelitian ini, konsep kebijakan luar negeri perspektif strategi yang dikemukakan oleh John Lovell akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis bentuk strategi yang diambil oleh Arab Saudi dalam kerjasama pembangunan ekonomi dengan Tiongkok untuk mewujudkan Saudi Vision 2030. Pola strategi yang dihasilkan menjadi hasil dari pertimbangan terhadap aspek-aspek yang memengaruhi diantaranya yaitu perbandingan kapabilitas ekonomi kedua negara serta persepsi dan posisi Arab Saudi terhadap strategi BRI Tiongkok.

b. Kerjasama Bilateral

Setiap negara pada dasarnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri utamanya terkait dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan dalam negaranya. Oleh sebab itu, setiap negara melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Tak bisa dipungkiri bahwa kerjasama internasional dibutuhkan karena setiap negara berada dalam

kondisi yang saling bergantung dalam memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya, hakikat manusia juga saling bersikap kooperatif yang kemudian diwujudkan dalam suatu hubungan antar negara yang menjadi faktor pendorong terwujudnya kerjasama internasional (Hadiwinata, 2017, p. 24)

Berdasarkan bentuknya, kerjasama internasional terbagi menjadi 4 yaitu kerjasama bilateral, kerjasama trilateral, kerjasama multilateral, dan kerjasama regional (Perwita & Yani, 2005, p. 49). Berdasarkan tiga bentuk kerjasama diatas, maka dalam penelitian ini, konsep kerjasama internasional yang akan digunakan adalah konsep kerjasama bilateral yang terjalin antar dua negara. Dalam hal ini, Arab Saudi dan Tiongkok menjadi objek pembahasan sebagai dua negara yang menjalin hubungan dan kerjasama bilateral dalam rangka pembangunan infrastruktur dalam mewujudkan Saudi Vision 2030. Secara umum, hubungan bilateral dilandasi adanya kepentingan nasional setiap negara yang melakukan kerjasama. Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi atau tidak dimiliki oleh suatu negara secara internal dapat diperoleh dengan menjalin hubungan bilateral dengan negara lain.

Kerjasama bilateral juga terdiri dari berbagai jenis tergantung dari konteks kerjasama yang berusaha dibangun oleh kedua negara seperti kerjasama ekonomi, kerjasama budaya, dan kerja sama keamanan. Dalam melihat proses kepentingan dua negara untuk mencapai tujuan, konsep kerjasama bilateral penting digunakan untuk melihat kerjasama antara dua negara untuk memenuhi kepentingan masing-masing negara dalam bidang apapun. Menurut Manda dan Nicolescu, kerjasama bilateral adalah hubungan yang terjalin antara dua negara yang dimana masing-

masing pihak memiliki tujuan untuk pembangunan lokal bersama serta otoritas eksekutif menjadi protagonis utama dari hubungan tersebut. Bentuk hubungan ini berkaitan dengan upaya pemecahan masalah kepentingan lokal meliputi pelayanan publik lokal, manajemen wilayah, kesehatan, dan lainnya dimana pihak berwenang memiliki fleksibilitas dalam menentukan dan menjalankan proses kerjasama. Alasan yang mendasari kerjasama bilateral ini adalah untuk menangani masalah kepentingan bersama yang dilakukan biasanya melalui: pertukaran pengetahuan dan pengalaman, pertukaran informasi, konsultasi teknis, pertukaran ahli, penyelenggaraan lokakarya, pertemuan, dan lainnya (Minca, 2015).

Menurut Holsti, terdapat variable-variabel yang harus diperhitungkan dalam kerjasama bilateral diantaranya (Holsti & Azhari, 1988, p. 13) yaitu :

- a. Kuantitas dan kualitas dari kapabilitas yang dimiliki oleh suatu negara
- b. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan
- c. Kredibilitas ancaman serta gangguan
- d. Derajat kebutuhan dan ketergantungan
- e. Responsivitas di kalangan pembuat keputusan

Pola aksi dan reaksi dari kerjasama bilateral ini mempunyai proses yang mempunyai sifat menguntungkan bagi kedua negara yang saling bekerja sama yaitu (Perwita & Yani, 2005) :

- a. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
- b. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.

- c. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.
- d. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.

Konsep kerjasama bilateral dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kerjasama pembangunan ekonomi yang terjalin antara Arab Saudi dan Tiongkok dalam berbagai bidang. Dalam kerjasama bilateral, kedua negara ini memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan masing-masing. Terjalannya kerjasama antara Arab Saudi dan Tiongkok ini tidak terlepas dari adanya kebijakan kedua negara terkait pembangunan yang sejalan yaitu Saudi Vision 2030 dan BRI. Oleh sebab itu, kerjasama kedua negara terbentuk dengan melihat variabel-variabel seperti kapabilitas yang dimiliki oleh masing-masing negara yang akan menciptakan peluang kerjasama dan digunakan untuk mencapai kebutuhannya. Disisi lain, respon pembuat kebijakan serta perhitungan terhadap beberapa tantangan juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kerjasama bilateral sesuai dengan yang dikemukakan oleh Holsti. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Perwita & Yani bahwa proses kerjasama bilateral terjadi ketika terdapat kebijakan aktual dari negara pemrakarsa yang kemudian memunculkan persepsi dan respon dari negara penerima sehingga tercipta aksi-reaksi antara kedua negara. Melalui Visi Saudi 2030, Arab Saudi kemudian semakin menjalin kerjasama dengan Tiongkok dengan program BRI yang ditawarkan untuk membantu dalam pembangunan dan pengelolaan proyek-proyek infrastruktur untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi. Begitu juga sebaliknya, Tiongkok yang melakukan kerjasama dengan Arab Saudi juga bermaksud untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya yaitu untuk

menyukseskan program BRI di Timur Tengah yang kemudian menciptakan peluang yang besar bagi kedua negara untuk bekerjasama. Kedua negara kemudian menjalin kerjasama yang erat utamanya dalam pembangunan ekonomi.

c. Investasi Asing

Setiap negara pastinya melakukan aktivitas ekonomi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah negara melakukan sebuah tindakan yang kemudian diwujudkan dengan berbagai mekanisme kebijakan. Adanya globalisasi ekonomi kemudian mendorong terciptanya suatu kondisi saling ketergantungan antar negara yang mendorong terbentuknya kerjasama ekonomi. Investasi adalah salah satu komponen yang berperan penting untuk menghadapi globalisasi ekonomi dan dapat digunakan menjadi sumber dana untuk aktivitas ekonomi dan pengembangan infrastruktur.

Menurut Sornarajah, investasi asing dipandang dapat bermanfaat bagi ekonomi negara penerima jika investasi dimanfaatkan untuk pembangunan ekonominya. Oleh karena itu, hal ini kemudian menjadi dorongan bagi negara-negara berkembang untuk mulai memberlakukan aturan yang dirancang untuk menyaring investasi asing yang dipertimbangkan akan memiliki dampak terhadap perekonomian domestik. Adapun aturan-aturan yang dibuat tersebut kemudian beradaptasi dan disesuaikan dengan prinsip liberalisme ekonomi (Sornarajah, 2004, p. 14). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wells & Ahmed bahwa negara-negara melakukan kompetisi untuk menarik modal asing dengan berupaya melakukan perubahan internal dan melakukan perjanjian dengan negara

lain. Oleh sebab itu, investasi saat ini mayoritas muncul dari negosiasi atau perjanjian bilateral khususnya di bidang investasi dan perdagangan (Wells & Ahmed, 2007, p. 296).

Negara-negara berkembang seringkali membutuhkan investasi asing yang biasanya berasal dari negara maju dengan perekonomian yang kuat demi untuk meningkatkan pembangunan di negara tersebut. Investasi asing dari negara maju ke negara berkembang biasanya dilakukan untuk mencapai kepentingan dan keuntungan yang bersifat *win-win solution* dengan negara penerima investasi. Investasi asing biasanya dilakukan oleh perusahaan negara ke negara lain atas nama pemerintah negara tujuan investasi. Adanya kebutuhan akan modal asing serta kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dari negara perekonomian kuat menyebabkan kedua pihak memiliki hubungan saling ketergantungan.

Investasi asing dikatakan memiliki manfaat bagi perekonomian negara tuan rumah bahwa modal asing yang dibawa masuk ke negara tuan rumah akan memastikan modal domestik yang tersedia akan dapat dialihkan untuk penggunaan lain seperti untuk kepentingan publik. Tidak hanya itu, investor asing juga biasanya membawa teknologi yang belum atau tidak tersedia di negara tuan rumah sehingga hal ini akan mengarah pada difusi teknologi dalam ekonomi tuan rumah. Lapangan kerja baru pun juga akan tercipta dan tenaga kerja yang dipekerjakan juga akan memperoleh keterampilan baru yang terkait dengan teknologi yang diperkenalkan oleh investasi asing. Keahlian dalam manajemen proyek besar juga akan ditransfer ke tenaga kerja lokal dan fasilitas infrastruktur yang dibangun oleh investor asing maupun oleh negara seperti transportasi,

kesehatan, atau pendidikan juga akan meningkat dan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. (Sornarajah, 2004, p. 51).

Menurut sifatnya, investasi asing terbagi menjadi dua bentuk yaitu investasi langsung dan investasi secara tidak langsung. Investasi asing langsung atau yang disebut sebagai *Foreign Direct Investment* (FDI) mengarah pada penanaman modal yang masuk melalui sektor riil dan bersifat jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur yang secara langsung dapat membantu perekonomian negara penerima investasi. FDI lebih menguntungkan dan mudah bagi investor karena dapat ikut terlibat langsung dalam mengontrol dan mengawasi arus modalnya. Adapun investasi secara tidak langsung atau yang disebut dengan investasi portofolio meliputi aktivitas transaksi yang masuk melalui pasar uang dan bersifat jangka pendek dan tidak stabil dikarenakan bergantung terhadap harga jual beli saham dan valuta asing yang sering berubah dengan cepat (Rahajeng, 2016).

Untuk mempermudah proses masuknya investasi asing, maka negara penerima harus mengatasi berbagai hambatan apapun. Stabilitas politik, keterbukaan ekonomi, kesamaan ideologi, budaya, ataupun kepentingan nasional yang sama menjadi faktor yang memudahkan proses penanaman modal antar negara dan untuk hubungan bilateral itu sendiri. Bagi para ekonom liberal, pasar bebas dengan penghilangan hambatan perdagangan serta pergerakan bebas untuk modal investasi dan tenaga kerja akan meningkatkan kekayaan bagi dunia secara keseluruhan (Mansbach & Rafferty, 2021, p. 26).

Dalam penelitian ini, konsep investasi asing yang dikemukakan oleh Sornarajah serta Wells & Ahmed akan digunakan untuk menganalisis program Saudi Vision 2030 yang dibentuk oleh Arab Saudi untuk mendiversifikasi ekonominya dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian bersinergi dengan program BRI Tiongkok yang juga berfokus pada transfer modal untuk pembangunan global. Adanya keselarasan dua program yaitu Saudi Vision 2030 dan BRI, kerjasama ekonomi dalam hal ini pembangunan infrastruktur kemudian terealisasikan melalui investasi asing dari Tiongkok untuk membantu dalam membangun proyek infrastruktur untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu untuk menggambarkan sebuah fenomena. Seluruh data akan dianalisis lalu kemudian akan menghasilkan sebuah penelitian dan dilakukan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan memberikan gambaran terkait kerjasama antara Arab Saudi dan Tiongkok khususnya dalam bidang infrastruktur untuk mewujudkan Saudi Vision 2030 serta peluang dan tantangan dalam kerjasama. Jenis penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait topik yang dibahas.

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang dapat diperoleh melalui :

1. Buku fisik dan e-book yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait kerjasama internasional dan bilateral, investasi asing, program Saudi Vision 2030 dan BRI, perkembangan ekonomi Arab Saudi dan Tiongkok, serta buku-buku lain dengan pembahasan yang masih terkait dan relevan.
2. Jurnal, Artikel Ilmiah, dan Report yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait data investasi asing, analisis kebijakan luar negeri Arab Saudi dan Tiongkok, kebijakan Belt and Road Initiative, program Saudi Vision 2030, dinamika hubungan bilateral Arab Saudi-Tiongkok, serta pembahasan lainnya yang terkait.
3. Situs web resmi dari pemerintah, organisasi, maupun perusahaan serta situs lain terpercaya yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait persentase jumlah investasi, persentase peningkatan pembangunan infrastruktur, perkembangan kerjasama yang terkait dengan Saudi Vision 2030 dan BRI, serta laporan hasil kerjasama dan data-data lainnya yang mendukung dan masih relevan.

c. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur (*literature research*) atau kajian pustaka. Hal ini berkaitan dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang

diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data berbasis dokumen dan internet seperti buku/e-book, jurnal, thesis, report, serta berita yang kredibel.

d. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan adalah teknik analisis deskriptif yaitu dengan menganalisis secara deskriptif seluruh data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan penelitian lalu kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Luar Negeri Perspektif Strategi

Dalam politik internasional, setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, setiap negara memiliki strategi masing-masing dalam implementasi kebijakan luar negerinya untuk mencapai kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri menjadi bentuk implementasi dari politik luar negeri suatu negara dan menjadi kebijakan yang dirumuskan oleh suatu negara dalam rangka hubungan dengan aktor negara maupun non-negara dan terdiri atas serangkaian proses yang meliputi proses perencanaan, strategi untuk mencapai tujuan, dan implementasi (Ashari, 2015, p. 194).

Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan tindakan atau sikap suatu negara dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan serta memelihara kelangsungan sebuah negara dan faktor internal dan eksternal seperti kapabilitas, institusi, geografi dan identitas nasional memengaruhi dan menjadi sebab akibat dari terbentuknya kebijakan luar negeri dikarenakan pada hakikatnya kebijakan luar negeri adalah mekanisme suatu negara untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkup domestik maupun global (Perwita & Yani, 2005, p. 49). Kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh suatu negara melalui kebijakan luar negeri adalah rancangan yang menggabungkan antara kepentingan nasional terhadap kondisi global yang sedang

terjadi serta bagaimana kapabilitas atau power yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapainya (Perwita & Yani, 2005, p. 51).

Menurut Charles Hermann dalam (Mansbach & Rafferty, 2021, p. 14), kebijakan luar negeri terdiri dari tindakan-tindakan resmi para pembuat keputusan dalam pemerintahan negara yang dilakukan untuk memengaruhi perilaku para aktor internasional di luar negara mereka. Melalui kebijakan luar negeri, setiap negara akan berfokus pada upaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya baik itu kepentingan dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam pengimplementasian kebijakan luar negeri, setiap negara memiliki strategi masing-masing. Pada dasarnya, strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan dalam konteks kebijakan luar negeri. Secara analitis, terdapat dua komponen strategi yaitu komponen ofensif untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan peluang dan perkiraan biaya dan komponen defensif untuk mencegah kerugian dari tindakan negara lain yang dianggap akan dapat mengancam kepentingan negara disamping rencana untuk mencegah kegagalan terjadi dalam upaya merespon ancaman (P.Lovell, 1970, p. 67).

Analisis kebijakan luar negeri sangat kompleks dan dilakukan untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat dan bentuk tawar menawar yang telah dicapai (P.Lovell, 1970, p. 71). Analisis kebijakan luar negeri dari perspektif strategi dilakukan dengan melihat posisi pembuat kebijakan yang akan membuat strategi yang dapat diketahui berasal dari pernyataan-pernyataan terkait pihak yang terlibat, taruhan yang diberikan, kemampuan untuk bersaing, dan perkiraan strategi yang akan ditempuh oleh pihak lain. Dengan menentukan estimasi

kemampuan negara sendiri dan memperkirakan kemampuan negara lain, maka pembuat kebijakan dapat membentuk strategi agar dapat bersaing dalam situasi tertentu (P.Lovell, 1970, p. 73).

Dalam analisis perspektif strategi, adanya pengakuan dari pembuat kebijakan untuk membenarkan tindakan mereka di dalam negeri serta kepada mitra asing diperlukan untuk membuat legitimasi akan strategi yang akan dijalankan. Adanya pernyataan resmi yang menyatakan pentingnya pemerintah melekatkan pada kepentingan atau bidang tertentu adalah teknik yang dapat digunakan untuk memperjelas tujuan kebijakan. Pernyataan akan komitmen seperti alokasi anggaran atau janji tertulis kepada publik berfungsi untuk memperkuat kredibilitas (P.Lovell, 1970, p. 80).

Menurut Lovell, konsep kebijakan luar negeri dari perspektif strategi merupakan sebuah rencana untuk mencapai kepentingan nasional dengan memperhatikan aspek persepsi elit, strategi negara dan negara lain serta kapabilitas suatu negara. Dalam hal ini, upaya pencapaian kepentingan nasional dapat dilakukan melalui interaksi antara pihak yang bekerjasama. Fokus dari perspektif ini yaitu lebih menekankan pada interaksi antar pihak-pihak yang terlibat daripada mengkaji peristiwa hanya dari sudut pandang pihak yang memberi tanggapan saja. Strategi kebijakan luar negeri mencerminkan perkiraan kemampuan negara sendiri dibandingkan kemampuan negara lain. Analisis kebijakan luar negeri dari perspektif ini berusaha untuk mengidentifikasi perkiraan yang dibuat oleh pembuat kebijakan suatu negara terhadap strategi yang dibuat oleh negara lain (P.Lovell, 1970, p. 73).

Struktur sistem internasional (faktor internal-eksternal), strategi negara lain, persepsi elit, dan kapabilitas yang dimiliki negara tersebut disebut sebagai faktor yang memengaruhi proses perumusan strategi kebijakan luar negeri suatu negara. Empat faktor ini kemudian yang membentuk pola interaksi antar negara dalam perspektif ini meliputi *leadership strategy*, *confrontation strategy*, *accommodative strategy*, dan *concordance strategy*.

Leadership Strategy adalah strategi saat kapabilitas negara sendiri dianggap lebih unggul daripada negara lain dan strategi negara lain dianggap dapat mendukung kepentingan nasional negara. Sehingga bentuk strategi yang digunakan adalah dengan melalui tawar-menawar atau bujukan daripada melalui kekerasan. Negara A akan dikatakan berhasil mengejar strategi jika negara B mengikuti inisiatif dan pedoman kebijakan negara A. Situasi yang terjadi berupa kedua negara memiliki kepentingan bersama sehingga strategi A adalah memberikan penguatan pada insentif yang sudah ada bagi B untuk mengikuti serangkaian tindakan yang mendukung kepentingan (P.Lovell, 1970, p. 99). Kemudian *concordance strategy* adalah strategi yang dibuat saat kapabilitas atau kemampuan nasional negara A dianggap lebih rendah dibanding B. Hal ini mengacu saat adanya kepentingan antar negara yang saling menguntungkan. Sehingga negara A cenderung akan berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan negara B yang memiliki kapabilitas lebih unggul. Dalam beberapa contoh, negara A mungkin secara teratur akan berkonsultasi dengan negara B dan bertindak selaras dengan inisiatif negara B sehingga negara B berada pada posisi yang dapat memengaruhi tindakan bersama. Hal ini terjadi

dalam situasi dimana kedua negara memiliki kesamaan kepentingan. Adapun kedua pola interaksi ini merupakan pola yang melihat strategi negara lain sebagai strategi yang mendukung kepentingan nasional (P.Lovell, 1970, p. 100).

Adapun sebaliknya, *confrontation strategy* merupakan strategi disaat kapabilitas atau kemampuan negara sendiri unggul dibanding negara lain sehingga dengan bebas melakukan tindakan yang dapat memicu konflik dengan mempertajam kepentingan yang bertentangan yang kemudian memaksa negara lain untuk pengakuan akan keunggulan kapabilitasnya. Hal ini terjadi saat pembuat kebijakan percaya bahwa strategi negara lain mengancam kepentingan nasionalnya sehingga mereka melakukan strategi konfrontasi. *Accommodation strategy* merupakan strategi disaat kapabilitas negara sendiri lebih rendah dibanding negara lain sehingga strategi yang diambil adalah cenderung untuk menghindari konflik yaitu dengan menyesuaikan diri dan mengakui keunggulan negara yang kapabilitasnya lebih tinggi untuk menghindari konflik. Kedua pola ini melihat strategi yang dikeluarkan oleh negara lain sebagai strategi yang mengancam kepentingan nasional (P.Lovell, 1970, p. 100).

Asumsi dasar dari model strategi kebijakan luar negeri adalah bahwa aktor berupaya untuk memaksimalkan pencapaian kepentingan berdasarkan perhitungan rasional di dalam kancah politik global. Pada perspektif strategi ini, para pembuat keputusan dianggap sebagai *solitary actors* yang berupaya untuk memaksimalkan tercapainya tujuan negara dalam lingkup politik global (Perwita & Yani, 2005, p. 63). Kebijakan luar negeri hampir melibatkan seluruh aspek termasuk strategi negara yang kemudian dibuat sedemikian rupa untuk mencapai kepentingan

nasional suatu negara. Kebijakan luar negeri biasanya mencakup segala bidang termasuk ekonomi. Kebijakan luar negeri yang berfokus pada bidang ekonomi berasal dari strategi ekonomi suatu negara dan disusun dari gabungan faktor domestik dan global yang memengaruhi terbentuknya sebuah strategi. Keselarasan kepentingan dalam pembuatan kebijakan sangat penting untuk keberhasilan kebijakan. Adapun kegagalan dalam suatu kebijakan ekonomi luar negeri disebabkan karena kurangnya koordinasi dalam mengatasi berbagai isu dalam negeri yang kemudian menciptakan tekanan tersendiri bagi negara.

B. Kerjasama Bilateral

Hakikat manusia pada dasarnya saling bersikap kooperatif yang kemudian diwujudkan dalam suatu hubungan antar negara yang dapat menjadi faktor pendorong terwujudnya kerjasama internasional. Hal ini dikarenakan faktanya setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga aktor internasional menciptakan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan (Hadiwinata, 2017, p. 24). Adanya peningkatan kerjasama untuk mengejar kepentingan bersama serta hubungan antarnegara yang terlihat spontan dan tanpa paksaan kemudian menjadi salah satu ciri utama hubungan internasional (Steans & Pettiford, 2009).

Menurut Robert Keohane, kerjasama terjadi ketika aktor negara maupun non-negara menyesuaikan sikap dan tindakan mereka untuk merespon tindakan ataupun keputusan pihak lain dan kemudian diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan. Kemudian dalam kerjasama juga terdapat dua elemen penting yaitu pertama adalah perilaku setiap aktor yang diarahkan pada tujuan bersama dan

yang kedua adalah dengan adanya kerjasama akan memberi setiap pihak yang terlibat sebuah keuntungan bersama yang menguntungkan. Menurut Keohane, adanya kebijakan para aktor yang memfasilitasi pencapaian tujuan lainnya serta tidak adanya tindakan yang saling merugikan akan menciptakan harmoni dalam hubungan antar negara (Bakry, 2017, pp. 73-74).

Kondisi dimana setiap negara yang terlibat dapat berinteraksi dengan menggunakan strategi timbal balik dikatakan sebagai kondisi yang kondusif untuk bekerja sama (Bakry, 2017, p. 75). Umumnya dikatakan bahwa dua negara akan melakukan kerjasama saat keduanya memiliki keinginan untuk saling membantu dalam mencapai suatu tujuan yang akan sulit dicapai jika dilakukan sendiri. Kerjasama ekonomi seperti melalui perdagangan dan investasi menjadi salah satu bentuk tindakan timbal balik dimana kerjasama yang terjalin tentunya harus memberikan imbalan atau keuntungan bagi dua pihak (Hamdani, 2019).

Kerjasama yang terjadi antar negara juga diwujudkan di berbagai bidang seperti politik, sosial, budaya, energi, dan ekonomi. Kerjasama yang terjalin antar negara juga biasanya semakin meningkat dan menciptakan suatu kondisi saling ketergantungan. Menurut David Mitrany dalam buku *The Functional Theory of Politics* juga menyatakan bahwa ketika sebuah kerjasama antar negara semakin intens, maka kerjasama yang telah berhasil di bidang tertentu misalnya teknologi, akan menimbulkan *spill-over effect* yaitu terciptanya peluang kerjasama dalam bidang-bidang fungsional lainnya seperti kerjasama di sektor perdagangan, sumber daya alam, energi, dan lain-lain. Dalam situasi ini kemudian tercipta sebuah proses saling ketergantungan antar negara yang juga akan semakin

terdorong untuk memperluas lingkup kerja sama mereka (Hadiwinata, 2017, p. 91).

Kerjasama internasional terbagi menjadi empat bentuk yaitu kerjasama bilateral, trilateral, multilateral, dan regional (Perwita & Yani, 2005, p. 49). Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang melibatkan partisipasi dari dua negara yang berbeda atau lembaga dari dua negara tersebut. Sumber kerjasama bilateral biasanya adalah pemerintah dari negara-negara yang memelihara hubungan berdasarkan kerjasama internasional. Kerjasama bilateral tercipta dari adanya hubungan bilateral antar dua negara. Hubungan bilateral biasanya bersifat *government-to-government* melalui lembaga atau kedutaan yang menjadi wadah kerjasama ataupun lembaga koordinasi (MOH Ethiopia, 2022, p. 9).

Menurut Holsti, terdapat variable-variabel yang harus diperhitungkan dalam kerjasama bilateral diantaranya (Holsti & Azhari, 1988) yaitu :

- a. Kuantitas dan kualitas dari kapabilitas yang dimiliki oleh suatu negara
- b. Keterampilan menggunakan kapabilitasnya untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional
- c. Adanya ancaman, gangguan, dan hambatan
- d. Derajat kebutuhan dan ketergantungan
- e. Adanya respon dari kalangan pembuat keputusan

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang terjalin antar dua negara dalam berbagai bidang salah satunya adalah kerjasama ekonomi yang terdiri dari kerjasama perdagangan dan investasi. Kerjasama ekonomi terkait dengan kebijakan oleh kedua negara yang dibuat untuk mencapai kepentingan nasional

dan untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Manda dan Nicolescu memandang kerjasama bilateral sebagai hubungan yang terjalin antara dua negara yang dimana masing-masing pihak memiliki tujuan untuk pembangunan lokal bersama serta otoritas eksekutif menjadi protagonis utama dari hubungan tersebut. Bentuk hubungan ini berkaitan dengan Upaya pemecahan masalah kepentingan lokal meliputi pelayanan publik lokal, manajemen wilayah, kesehatan, dan lainnya dimana pihak berwenang memiliki fleksibilitas dalam menentukan dan menjalankan proses kerjasama. Alasan yang mendasari kerjasama bilateral ini adalah untuk menangani masalah kepentingan bersama yang dilakukan biasanya melalui: pertukaran pengetahuan dan informasi, pertukaran keterampilan dan pengalaman, pertukaran ahli, konsultasi teknis, penyelenggaraan lokakarya dan lainnya (Minca, 2015).

Disisi lain, pola aksi dan reaksi dalam kerjasama bilateral ini memiliki proses yang bersifat akan menguntungkan kedua negara yang saling bekerja sama yaitu :

- a. Rangsangan dalam bentuk kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
- b. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
- c. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.
- d. Presepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.

C. Investasi Asing

Liberalisasi ekonomi mendorong setiap negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang untuk terlibat dalam perekonomian global. Hal itu dikarenakan liberalisasi ekonomi menjanjikan transfer modal dan teknologi yang lebih baik. Transfer modal dengan lebih mudah didapatkan dari adanya penanaman modal asing yang dilakukan antar negara. Tak dipungkiri bahwa dalam perekonomian global kemudian tercipta suatu kondisi saling ketergantungan antar negara yang mendorong terbentuknya kerjasama ekonomi. Investasi menjadi salah satu komponen yang berperan penting untuk menghadapi globalisasi ekonomi dan menjadi sumber dana untuk aktivitas ekonomi dan pengembangan infrastruktur utamanya bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan modal.

Sejak adanya sistem ekonomi pasar bebas, negara-negara di dunia utamanya negara berkembang telah berupaya bergabung dalam sistem ini. Pemerintah negara-negara berkembang telah menunjukkan dukungan untuk para investor yang mayoritas berasal dari negara-negara maju untuk membantu dalam pembiayaan berbagai proyek besar seperti infrastruktur di negaranya. Hal ini mendorong negara-negara berkembang masuk dalam kompetisi untuk menarik modal asing dengan melakukan berbagai perubahan internal (Wells & Ahmed, 2007, p. 6). Sebagai upaya untuk mendapatkan investasi asing, negara melakukan perjanjian dengan negara lain. Sistem investasi saat ini mayoritas muncul dari negosiasi atau perjanjian bilateral khususnya di bidang investasi dan perdagangan (Wells & Ahmed, 2007, p. 296).

Investasi asing adalah salah satu faktor utama yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal asing akan bermanfaat untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi yang akan menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja. Investasi tidak hanya terbatas pada transfer modal atau uang semata melainkan juga termasuk transfer keterampilan teknik dan manajemen khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut M. Sornarajah dalam bukunya "*The International Law on Foreign Investment*" definisi investasi asing adalah sebagai berikut : *Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of assets.* (Sornarajah, 2004, p. 7).

Setiap negara semakin meningkatkan jalinan kerjasama ekonomi dengan negara lain seperti melalui perdagangan luar negeri maupun investasi asing. Para ekonom liberal beranggapan bahwa negara berkembang dengan berbagai masalah internal seperti peningkatan populasi, kurangnya produktivitas tenaga kerja, korupsi, kurangnya pembiayaan untuk kewirausahaan, dan kurangnya modal untuk infrastruktur ekonomi seharusnya perlu untuk berpartisipasi dan lebih terbuka dalam ekonomi global untuk memperoleh investasi asing dan melakukan perdagangan luar negeri untuk mengatasi berbagai masalah tersebut (Toma & Gorman, 1990, p. 322).

Transfer faktor produksi (tenaga kerja, modal, dan teknologi) akan memberi keuntungan bagi perkembangan ekonomi global. Modal dikatakan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik yang berasal dari dalam

negeri maupun luar negeri (investasi asing). Pertumbuhan ekonomi dapat didorong dalam negara yang menjadi penerima pinjaman luar negeri atau investasi asing. Investasi asing sangat penting jika suatu negara belum mampu untuk membuat suatu barang modal sendiri atau jika dibuat sendiri maka biayanya akan mahal (Sattar, 2017, p. 208).

Masuknya investasi asing dalam suatu negara diharapkan dapat memberi manfaat dan keuntungan timbal balik baik itu dari segi keuntungan (*profit*) untuk investor maupun dari segi manfaat (*benefit*) bagi masyarakat di negara penerima investasi. Bagi masyarakat dan negara penerima investasi, adanya investasi asing diharapkan dapat mendukung pembangunan dengan melalui penyediaan modal untuk proses produksi dan peningkatan taraf hidup. Namun demikian, selain sisi positif, masuknya investasi asing juga memiliki sisi negatif sehingga setiap negara perlu untuk melakukan pertimbangan dan seleksi agar investasi benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi manfaat bagi masyarakat (Rudy, 2007, p. 160).

Investasi asing juga terbagi menjadi dua bagian yakni investasi langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) dan investasi secara tidak langsung. Investasi langsung atau FDI lebih mengarah pada penanaman modal asing yang lebih nyata dimana bentuk-bentuk investasinya seperti pembangunan fasilitas jalan, pabrik, jaringan telekomunikasi, dan transportasi yang diharapkan dapat membantu perkembangan perekonomian negara penerima investasi. FDI dikatakan lebih menguntungkan dan akan memudahkan investor dikarenakan pihak pemberi investasi akan terlibat secara langsung untuk mengontrol dan

mengawasi arus modal. Selain itu, investasi ini juga bersifat jangka panjang dibandingkan dengan investasi secara tidak langsung. Adapun investasi secara tidak langsung berbentuk transaksi di pasar modal dan pasar uang. Penanaman investasi tersebut bersifat jangka pendek karena bergantung terhadap harga jual beli saham atau valuta asing yang sering mengalami fluktuasi atau perubahan yang cepat.

Menurut Sornarajah, transfer properti fisik seperti berbagai peralatan yang dibeli untuk pembangunan disebut sebagai penanaman modal asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Adapun investasi portofolio biasanya berupa pergerakan uang dengan tujuan untuk membeli saham di perusahaan yang dibentuk oleh perusahaan negara. Perbedaannya adalah bahwa dalam investasi portofolio dapat dilakukan di bursa saham hampir dimana saja di dunia dan negara tuan rumah tidak dapat mengetahui kepada siapa hubungan dibuat dan dilakukan. Sedangkan investasi asing langsung harus melewati persetujuan yang tegas dari negara tuan rumah untuk bisa masuk (Sornarajah, 2004, pp. 7-8).

Investasi langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) terbagi menjadi tiga variasi (Amalia, 2007, p. 126), yaitu :

1. Suatu perusahaan di luar negeri yang dimiliki 100% oleh warga negara investor, tetapi dibentuk untuk bekerja di luar negeri.
2. Suatu perusahaan di luar negeri yang 100% dimiliki oleh perusahaan dalam negeri dan bergerak sebagai perwakilan untuk perusahaan dalam negeri.

3. Pemilikan bersama atas perusahaan di luar negeri antara warga negara investor dan warga negara asing dimana investasi dilakukan. Hal ini disebut sebagai usaha patungan (*joint venture*).

Dari perspektif neo-merkantilis, perusahaan-perusahaan multinasional yang berasal dari suatu negara biasanya diartikan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah sebagai upaya untuk membantu dalam pencapaian kepentingan nasional dan tidak boleh melenceng dari kepentingan politik nasional. Oleh sebab itu, walaupun perusahaan transnasional diakui sebagai aktor non-negara, aktivitas perusahaan itu harus tetap dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah agar selaras dengan kepentingan nasional seperti penguasaan teknologi, kesejahteraan rakyat dan negara, pembatasan impor, proteksi pasar, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Rudy, 2007, p. 159). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa biasanya investasi asing dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan negara yang menjadi tujuan investasi yang masing-masing memiliki kepentingan.

Tidak hanya itu, investasi asing langsung juga membutuhkan berbagai syarat agar bisa berjalan dengan baik dan terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu dari kriteria tersebut adalah adanya stabilitas politik dalam negara penerima investasi. Selain itu, adanya kepentingan yang sama antara negara pemberi dan penerima juga menjadi syarat keberhasilan dari terlaksananya investasi asing. Adapun dalam hal pengelolaan kebijakan dan penyediaan fasilitas untuk melayani serta menarik investor asing terdapat dua macam manajemen kebijakan yang perlu dipersiapkan yaitu *Demand Management* dan *Supply Management*. *Demand Management* mencakup pengelolaan kebijakan agar tidak menyulitkan

investor yaitu dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kemudahan dan kelancaran perizinan. Sedangkan *Supply Management* mencakup penyediaan SDM dan sarana pendukung seperti tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan, sarana angkutan barang hasil produksi, dan fasilitas komunikasi (Rudy, 2007, p. 161).

Seperti yang dikemukakan oleh Mansbach & Rafferty (2021), untuk mempermudah proses masuknya investasi asing, maka terdapat kriteria bagi negara penerima untuk terlepas dari hambatan apapun. Stabilitas politik, keterbukaan ekonomi, kesamaan ideologi, budaya, ataupun kepentingan nasional yang sejalan menjadi faktor yang memudahkan proses penanaman modal antar negara dan untuk hubungan bilateral itu sendiri. Bagi para ekonom liberal, pasar bebas dengan penghilangan hambatan perdagangan serta pergerakan bebas untuk modal investasi dan tenaga kerja akan meningkatkan kekayaan bagi dunia secara keseluruhan.

Pedoman Bank Dunia tentang Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan pada tahun 1992 merangkum filosofi teori klasik yang mengakui bahwa :

“a greater flow of foreign direct investment brings substantial benefits to bear on the world economy and on the economies of developing countries in particular, in terms of improving the long term efficiency of the host country through greater competition, transfer of capital, technology and managerial skills and enhancement of market access and in terms of the expansion of international trade.” (Sornarajah, 2004, p. 55).

Dalam kaitannya dengan investasi asing langsung (FDI), terdapat lima hal terkait dengan dampak penanaman investasi asing yang perlu diperhatikan oleh negara tuan rumah/penerima investasi (*host country*) yang menjadi tempat

beroperasinya FDI tersebut yaitu dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dampak terhadap penghasilan masyarakat (*income per capita*), dampak terhadap penambahan modal untuk produksi (jangan sampai ada *flow of capital* atau peralihan *out flow* ke luar negeri), dampak terhadap lapangan kerja (*job creation*), serta dampak terhadap taraf hidup masyarakat (jangan sampai keberadaan penanaman modal asing justru akan memperbesar kesenjangan atau *equity*) (Rudy, 2007, p. 161).

Selain dampak-dampak diatas, aliran masuk FDI ke wilayah negara dikatakan sangat penting untuk keberhasilan transformasi dan untuk integrasi sebuah negara ke dalam sistem ekonomi global. Investor asing biasanya terlihat berpotensi mendapatkan keuntungan dari akses ke pasar baru yang murah. Adapun untuk negara penerima investasi, FDI akan memberikan potensi pendapatan tambahan dan pekerjaan, meningkatkan persaingan, dan mendukung terciptanya lingkungan ekonomi pasar (Liebscher, Christl, Mooslechner, & Ritzberger-Grunwald, 2007, p. 129).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu rujukan dan pedoman bagi peneliti untuk mempermudah proses penelitian dan pengerjaan skripsi. Berikut dilampirkan penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Penelitian Sean Foley yang berjudul “When Oil is Not Enough: Sino-Saudi Relations and Vision 2030” di tahun 2017 berfokus terkait kerjasama antara Arab Saudi dan Tiongkok terkait upaya sinergi antara program Saudi Vision 2030 dan BRI. Meskipun energi masih berperan dalam hubungan bilateral kedua negara,

Sean Foley mengatakan bahwa hubungan kedua negara di masa depan tidak menutup kemungkinan akan ditentukan oleh ikatan ekonomi dan budaya dimana hal itu telah ditunjukkan melalui kerjasama program Saudi Vision 2030 dan BRI yang menekankan pada kerjasama di bidang non-energi (Foley, 2017).

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kiky Amalia SR pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Faktor Eksternal-Internal Arab Saudi Dalam Meningkatkan Kerjasama Ekonomi Dengan China Tahun 2016” yang menjelaskan bahwa terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang melatarbelakangi Arab Saudi untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri model adaptif (*adaptive model of foreign policy*) dari James N. Rosenau, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor eksternal yang memengaruhi Arab Saudi untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok yakni adanya ketegangan hubungan antara Arab Saudi, Iran, dan Amerika Serikat serta turunnya harga minyak Arab Saudi sebagai komoditas utama ekspor negaranya dan kaitannya dengan GCC. Adapun faktor internal yang memengaruhi yaitu bagaimana peran Raja Salman sebagai kepala negara dalam merespon faktor eksternal yang muncul (SR, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Grasela Kismi Umboh pada tahun 2019 yang berjudul “Reformasi Ekonomi Arab Saudi Dibawah Kekuasaan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman Melalui Saudi Vision 2030” yang berfokus pada penjelasan terkait Saudi Vision 2030 yang merupakan program reformasi Arab Saudi agar tidak bergantung pada sektor minyak dan menjadikan kerajaan

lebih terbuka di lingkup global. Penelitian ini menggunakan konsep diversifikasi dan reformasi ekonomi dan selanjutnya dilakukan analisis menggunakan teori *rational choice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman disebut sebagai aktor yang rasional karena mengeluarkan visi ambisius untuk melakukan reformasi yang penting untuk dilakukan. Melalui program reformasi Saudi Vision 2030, telah banyak proyek-proyek ambisius yang direncanakan atau sementara telah dijalankan untuk mewujudkan tujuan dari visi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerajaan (Umboh, 2019).

Mengacu pada penelitian terdahulu diatas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki beberapa kemiripan utamanya terkait fokus penelitian dan konsep yang digunakan. Akan tetapi, dalam penelitian ini juga terdapat beberapa hal yang menjadi perbandingan dengan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas. Perbandingan tersebut diantaranya terkait fokus penelitian dimana penelitian ini hanya akan berfokus pada analisis strategi Arab Saudi dalam melakukan kerjasama pembangunan ekonomi dengan Tiongkok untuk mewujudkan Saudi Vision 2030 beserta dengan peluang dan tantangan dalam kerjasama tersebut. Sedangkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kebijakan luar negeri perspektif strategi, konsep kerjasama bilateral, dan konsep investasi asing.